



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

PAPARAN DIRJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

DALAM RANGKA SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH

JAKARTA, 14 NOVEMBER 2018

PERAN STRATEGIS PERATURAN PEMERINTAH BIDANG BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROGAM DITJEN BINA ADWIL DALAM RENSTRA

PENYELENGGARAAN HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH SERTA KERJASAMA DAERAH

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN, PERKOTAAN DAN BATAS NEGARA

PEMBINAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYRAKAT

FASILITASI PENCGAHAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN

PENATAAN WILAYAH ADMINISTRASI, PENEGASAN BATAS DAERAH, DAN TOPONIMI

- PP 17 TH 2018
- PP 28 TH 2018
- PP 33 TH 2018

- PP 17 TH 2018
- PP 43 TH 2010

PP 16 TH 2018

- ❖ PP 2 TH 2018
- ❖ PMDN 101 TH 2018

PSL 38 UU 23 TH 2014

PP 16 TAHUN 2018 TENTANG SATPOL PAMONG PRAJA, YG MEMBEDAKAN DENGAN SEBELUMNYA (PP 6 TAHUN 2010) ADALAH **penguatan fungsi penegakan perda dan perkara DAN pengaturan tentang pejabat penyidik, ANTARA LAIN:**

- ✓ KOORDINASI DENGAN K/L LAINNYA DALAM PENEKAKAN PERDA (PSL 8)
- ✓ PEMBERIAN PENGHARGAAN (PSL 31)
- ✓ PENGUATAN SDM SATPOL PP DG PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL (BAB IV)
- ✓ PENGUATAN KELEMBAGAAN (PSL 25 AYAT (2) Hrf F)

PP 17 TH 2018 TENTANG KECAMATAN YG BEDA DENGAN PP SEBELUMNYA (PP 19 TH 2008) ADALAH dikarenakan antara lain Penguatan peran, tugas dan fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkup kecamatan dan memberikan perhatian khusus bagi pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat; Pembentukan Kecamatan diwil perbatasan, FORKOMPIMDA DI KECAMATAN, ANTARA LAIN:

- ✓ KELURAHAN (BAB III)
- ✓ DANA KELURAHAN (PSL 30)
- ✓ KECAMATAN DI PERBATASAN ANTAR NEGARA (PSL 7)
- ✓ TUGAS TAMBAHAN CAMAT UNTUK PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (PSL 10 Hrf a; PSL 10; PSL 15; PSL 28)

PP 28 TAHUN 2018 TENTANG KERJA SAMA DAERAH, YG MEMBEDAKAN DENGAN SEBELUMNYA (PP 50 TAHUN 2007) ADALAH **peningkatan sinergitas berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah antara Pemerintah Pusat dengan daerah, jaminan pelayanan publik yang disediakan pemerintah daerah, perlindungan terhadap inovasi daerah, ANTARA LAIN:**

- ✓ KERJA SAMA SUKARELA (PSL 3)
- ✓ PENGAMBILALIHAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN APABILA TDK DILAKSANAKAN (PSL 10)
- ✓ BANTUAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH (PSL 12)
- ✓ PEMBENTUKAN ASOSIASI (PSL 45)
- ✓ SINERGITAS PUSAT DAN DAERAH (PSL 46)

KEMENDAGRI

HARUS MENJADI “POROS” JALANNYA PEMERINTAHAN NASIOONAL, DAERAH,

MENGUATKAN PELAYANAN PUBLIK/DEMOKRASI DA TEGAKNNYA INTEGRITAS BANGSA
SECARA MUSYAWARAH DAN GOTONG ROYONG

UU NO 23 TAHUN 2014

```
graph TD; UU[UU NO 23 TAHUN 2014] --> PP18[PP 18 TH 2016 TUSI OTDA]; UU --> PP2[PP 2 TH 2018 TUSI BANGDA]; UU --> PP16[PP 16 TH 2018 TUSI ADWIL]; UU --> PP17[PP 17 TH 2018 TUSI ADWIL]; PP18 --- J1(( )); PP2 --- J1; PP16 --- J1; PP17 --- J1; J1 --> PP12[PP 12 TH 2017 TUSI ITJEN]; J1 --> PP28_1[PP 28 TH 2018 TUSI ADWIL]; PP16 --- J2(( )); PP17 --- J2; J2 --> PP28_2[PP 28 TH 2018 TUSI ADWIL];
```

PP 18 TH 2016
TUSI OTDA

PP 2 TH 2018
TUSI BANGDA

PP 16 TH 2018
TUSI ADWIL

PP 17 TH 2018
TUSI ADWIL

PP 12 TH 2017
TUSI ITJEN

PP 28 TH 2018
TUSI ADWIL

PP 28 TH 2018
TUSI ADWIL

TERIMA KASIH



PENYUSUNAN PERMENDAGRI KHUSUS BATAS DAERAH TAHUN KE TAHUN

